



ANALISA

12 Januari 2025

Vol. 0002

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



Ilustrasi Kompas.id



Fadillah Putra

Member of Advisory Board at The Reform Initiatives

Mahalnya "Belanja Wibawa" di Negeri Ini

Tak banyak masyarakat mengetahui berapa banyak para pejabat negara menghabiskan uang negara untuk kebutuhan pribadi yang dibungkus sebagai fasilitas jabatan. Belanja negara yang seharusnya diarahkan untuk pelayanan publik dan program pembangunan ternyata tersedot untuk menopang gaya hidup simbolik para elite birokrasi, dari tunjangan, perjalanan dinas, perumahan, kendaraan, komunikasi, hingga protokoler dan representasi pribadi.

Berdasarkan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 serta sejumlah peraturan keuangan, pejabat setingkat menteri dan eselon I menerima tunjangan kinerja (tukin) Rp 80 juta hingga Rp 117 juta per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan keluarga. Tambahan lain berupa tunjangan jabatan sekitar Rp 13 juta dan uang makan serta transportasi hingga berkisar Rp 5 juta per bulan.

Fasilitas rumah dinas bernilai miliaran rupiah di kawasan strategis, kendaraan dinas dengan harga mencapai Rp 900 juta-Rp 1,2 miliar per unit, serta sopir dan asuransi kendaraan ditanggung penuh negara. Jika semua komponen ini dijumlahkan, biaya personal pejabat tinggi negara bisa melampaui Rp 150 juta per bulan, belum termasuk belanja operasional.

Belanja perjalanan dinas juga menunjukkan pemborosan yang jarang disadari publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, tarif hotel pejabat tinggi di Ibu Kota dapat mencapai Rp 9,33 juta per malam untuk kamar suite, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk perjalanan luar negeri, uang harian bagi pejabat tinggi ditetapkan 380-430 dollar AS per hari, belum termasuk tiket pesawat kelas bisnis, biaya pengemudi, ajudan, dan dana representasi lapangan.

Dalam setahun, biaya perjalanan dinas seorang pejabat tinggi dapat menembus Rp 1 miliar-Rp 2 miliar tergantung intensitas kunjungan kerja. Di sisi lain, pegawai pelaksana di lapangan hanya menerima uang harian Rp 400.000-Rp 600.000.

Anggaran untuk komunikasi dan representasi pribadi juga mengalir deras. Fasilitas pulsa dan internet bagi pejabat tinggi bisa mencapai Rp 15 juta-Rp 25 juta per bulan, sementara anggaran "komunikasi publik" di tingkat kementerian dapat mencapai puluhan miliar rupiah per tahun, sebagian digunakan untuk memperkuat citra pejabat di media sosial dan kegiatan seremonial.

Tak berhenti di sana, tunjangan perumahan diberikan meskipun rumah dinas sudah tersedia, yang nilainya bisa mencapai Rp 30 juta-Rp 40 juta per bulan, sebuah pola double benefit yang lazim terjadi di banyak lembaga pemerintahan.

Pada level legislatif dan daerah, pola yang sama berulang. Paket kompensasi total pejabat wakil rakyat mencapai Rp 200 juta-Rp 250 juta per bulan, termasuk tunjangan aspirasi, komunikasi, perumahan, dan reses. Sementara di tingkat daerah, pejabat setingkat kepala daerah memperoleh gaji dan tunjangan total Rp 120 juta-Rp 150 juta per bulan dengan fasilitas kendaraan dan rumah dinas yang biayanya mencapai miliaran rupiah.

Belum lagi anggaran seremonial, jamuan tamu, dan protokoler yang di banyak daerah menyerap 1-2 persen dari total APBD tanpa tolok ukur kinerja yang jelas.

Jika semua komponen "belanja wibawa" ini dijumlahkan, seorang menteri diperkirakan menghabiskan Rp 252 juta hingga Rp 407 juta per bulan atau Rp 3,0 miliar sampai Rp 4,9 miliar per tahun untuk tunjangan, perjalanan, kendaraan, rumah dinas, komunikasi, ajudan, dan operasi pendukung lainnya. Pejabat setingkat eselon I rata-rata mengeluarkan Rp 156 juta hingga Rp 312 juta per bulan atau Rp 1,9 miliar sampai Rp 3,7 miliar per tahun.

Pejabat setingkat eselon II berada pada kisaran lebih rendah tetapi tetap signifikan, yaitu Rp 71,7 juta hingga Rp 179 juta per bulan atau Rp 860 juta sampai Rp 2,15 miliar per tahun.

Angka-angka tersebut dihitung dengan memasukkan komponen tukin, tunjangan jabatan bila ada, uang makan/transportasi, tunjangan perumahan, komunikasi, amortisasi kendaraan dinas (diasumsikan amortisasi lima tahun), biaya perjalanan dinas tahunan, serta biaya operasional pendukung; rentang mencerminkan variasi kebijakan unit kerja dan intensitas perjalanan.

Pertanyaannya adalah, "Mengapa struktur anggaran seperti ini terus bertahan, bahkan cenderung membengkak? Masalahnya bukan hanya teknis, melainkan kultural. Pola ini lahir dari "politik kosmogoni", yaitu pandangan lama bahwa pejabat adalah figur "penjaga kosmos negara" yang harus tampil berwibawa, berjarak, dan terhormat di mata publik.

Dalam kerangka tersebut, kemewahan bukanlah pemborosan, melainkan simbol legitimasi kekuasaan. Itulah yang disebut sebagai "belanja wibawa", yakni pengeluaran publik yang ditujukan untuk menjaga kehormatan jabatan, bukan meningkatkan kinerja pelayanan.

Sayangnya, logika belanja wibawa ini juga dikuatkan oleh masyarakat sendiri. Banyak warga yang masih memaklumi kemewahan pejabat dengan alasan "pejabat harus tampak berwibawa agar dihormati". Mentalitas ini menciptakan siklus legitimasi semu: kemewahan dianggap perlu agar kekuasaan terlihat kuat, sementara rakyat diminta untuk tidak menggugat karena dianggap bagian dari "tata hormat" kepada pemimpin. Padahal, yang dibutuhkan negara bukan pejabat yang berwibawa secara simbolik, melainkan yang bekerja keras mencapai target pembangunan dan transparan terhadap setiap rupiah uang publik.

Tak ayal lagi, saat ini mendesak untuk melakukan audit total atas seluruh anggaran kosmogonis, atau belanja yang berfungsi menjaga wibawa pejabat, bukan mendukung fungsi pelayanan publik. Audit ini harus mencakup semua komponen: rumah dinas, kendaraan, perjalanan dinas, komunikasi, dan anggaran representasi pribadi. Pemerintah juga perlu menetapkan batas maksimal nilai fasilitas pejabat, misalnya kendaraan dinas tidak boleh melebihi Rp 500 juta per unit dan akomodasi hotel tidak boleh melampaui standar ASN umum.

Lebih jauh, transparansi real time terhadap belanja publik harus dibuka melalui platform daring yang dapat diakses publik, termasuk laporan penggunaan dana operasional menteri dan pejabat tinggi lain. Hanya dengan cara ini, rakyat dapat mengetahui dengan jelas berapa biaya yang mereka tanggung untuk setiap lapisan kemewahan birokrasi.

Reformasi birokrasi sejati tidak cukup berbicara tentang efisiensi atau digitalisasi pelayanan. Ia harus menyentuh akar budaya kosmogonis yang menjadikan jabatan sebagai simbol, bukan tanggung jawab. Tanpa pembongkaran paradigma ini, seluruh jargon good governance, pelayanan prima, dan akuntabilitas publik akan tetap menjadi hiasan pidato semata. Republik yang sehat tidak dibangun dengan belanja wibawa, tetapi dengan etos pelayanan dan kesetaraan di hadapan anggaran negara.